

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Dongkrak PAD, Satpol PP Tertibkan BTS

Entitas / Cakupan : Kabupaten Bandung

Sumber / Hal : Galamedia / Hal.4

Edisi : Jum'at, 29 Juni 2018

Dongkrak PAD,

Satpol PP Tertibkan BTS

SOREANG, (GM).-

Guna memastikan legalitas pemasangan atau pembangunan *base transceiver station* (BTS) yang tersebar di Kabupaten Bandung, petugas Satpol PP berharap ada pemasangan papan pengumuman di bagian bawah menara telekomunikasi tersebut.

Imbauan itu disampaikan Kepala Satpol PP Kab. Bandung, Drs. Yogie Usman, M.Si., kepada "GM" di Soreang, Kamis (28/6). Menurutnya, pemasangan papan pengumuman itu sangat penting untuk memberikan kejelasan atau informasi keberadaan BTS tersebut baik kepada pemerintahan

maupun warga sekitar.

"Selama ini tercatat ada sekitar 16 BTS yang diduga ilegal, dan sudah dilakukan penyegelan untuk segera dibongkar. Untuk penanganan selanjutnya, kami sempat kesulitan untuk menemui pemiliknya. Masalahnya, banyak yang tidak tahu siapa pemilik BTS tersebut. Meski begitu, tetap kami segel setelah mendapat pengaduan dari sejumlah pihak yang mengeluhkan keberadaan menara telekomunikasi tersebut," ungkap Yogie.

Yogie menambahkan, untuk membantu kinerja Satpol PP dalam penertiban BTS, pihaknya

berharap di papan pengumuman tersebut harus dijelaskan nomor perizinan pembangunan menara telekomunikasi yang dikeluarkan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kab. Bandung.

"Kemudian nama perusahaan atau pemiliknya termasuk alamat perusahaan dan nomor telepon yang bisa dihubungi, harus dicantumkan. Pasalnya bila ada keluhan dan permasalahan di lapangan, kita mudah mengonfirmasi. Tapi apa yang terjadi saat ini, kita susah menghubungi pemiliknya," katanya.

Yogie mengakui, awalnya kesulitan mendapatkan informasi

siapa pemilik BTS yang diduga ilegal tersebut. "Tapi setelah kita segel, baru ada yang datang. Setelah kita tanya, ada pemilik BTS yang belum mampu memperlihatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Atas dasar itu, kita lakukan pembongkaran. Namun, ada pula BTS yang dibiarkan begitu saja, dan tak jelas pemiliknya," katanya.

Disebutkan, peneriban BTS itu pun berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Bandung. "Karena banyak BTS yang disinyalir ilegal, Pemkab Bandung kehilangan PAD cukup besar," jelasnya. **(B.105)****